



# IMPLEMENTASI PROGRAM KONTEN LOKAL MELALUI SISTEM STASIUN JARINGAN DI BENGKULU (Studi Kasus RCTI, KOMPAS Dan TRANS 7)

## IMPLEMENTATION LOCAL CONTENT PROGRAM BY NETWORK STATION SYSTEM IN BENGKULU CITY (Case Study RCTI, KOMPAS DAN TRANS 7)

**DYAH NOOR INTAN**

Program studi Ilmu Komunikasi Universitas Ratu Samban, Bengkulu, Indonesia

\*Email Korespondensi: [dyahnoorintan@gmail.com](mailto:dyahnoorintan@gmail.com)

### How to Cite :

Intan, D.N.. (2025) IMPLEMENTASI PROGRAM KONTEN LOKAL MELALUI SISTEM STASIUN JARINGAN DI BENGKULU (Studi Kasus RCTI, KOMPAS Dan TRANS 7) . SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities. 6(1). DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.6.1.57-68>

### ARTICLE HISTORY

Received 14 April 2025]  
Revised [21 May 2025 ]  
Accepted [30 May 2025]  
Published [30 June 2025]

### KEYWORD

Local content programs,  
Network Station System,  
Private Broadcasting  
Institutions, SSJ, human  
resources

**This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license**



### ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi program konten lokal melalui Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) pada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) di Bengkulu. LPS yang menjalankan SSJ harus mendapatkan izin secara nasional dan lokal di daerah penyebaran siarannya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan analisis data melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program konten lokal pada LPS seperti RCTI, KOMPAS TV, dan TRANS 7 mengandung unsur lokal dalam SDM dan isi program, namun masing-masing menghadapi kendala, seperti sulitnya mencari SDM lokal, kualitas produksi yang belum memenuhi standar, dan kesulitan menarik minat pembuat iklan. Masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat dari program konten lokal karena tayangan yang cenderung mengulang episode tanpa pembaruan informasi. Hasil survei menunjukkan bahwa program konten lokal lebih disukai oleh audiens usia 25-30 tahun dan 50-60 tahun, sementara kelompok usia 17-25 tahun lebih memilih menggunakan ponsel pintar sebagai sarana hiburan dan informasi.

### ABSTRACT

*This study discusses the implementation of local content programs through the Network Station System (SSJ) at Private Broadcasting Institutions (LPS) in Bengkulu. LPS operating SSJ must obtain permits both nationally and locally in the areas where their broadcasts are distributed. The research uses data collection techniques such as observation, interviews, and documentation studies, with data analysis through collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. The results show that local content programs at LPS like RCTI, KOMPAS TV, and TRANS 7 incorporate local elements in both human resources and program content. However, each faces challenges such as difficulty finding local personnel, production quality not meeting national standards, and struggles to attract advertisers. The public has not fully benefited from local content programs due to shows that tend to repeat episodes without updating information. Survey results indicate that local content programs are preferred by audiences aged 25-30 and*

50-60, while those aged 17-25 are more likely to use smartphones for entertainment and information.

## PENDAHULUAN

Lembaga penyiaran kemudian berkembang dan tidak lagi dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah yang memegang utuh sistem stasiun televisi ditakutkan akan memonopoli lembaga penyiaran tersebut, untuk dapat mengikuti keinginan pribadi dan bukan semata – mata karena menjadi salah satu lembaga informasi publik, sehingga dengan adanya surat izin dari pemerintah, lembaga penyiaran diberi kebebasan khusus yang mendorong stasiun televisi swasta yang lainnya tumbuh dan berkembang.

Keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman konten (*diversity of content*) dalam sistem stasiun berjaringan akan terbentuk pemerataan dalam distribusi iklan, di mana sebelumnya porsi iklan yang hanya dapat dinikmati televisi yang ada di pusat, akan dapat dirasakan juga oleh televisi-televisi swasta lain dan televisi lokal yang terbentuk sehingga akan terjadi pemerataan ekonomi di bidang penyiaran. (Armando, 2010).

Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) pada stasiun televisi swasta nasional tidak dapat lagi hanya mengandalkan stasiun relay, melainkan harus dengan perantara stasiun televisi yang berada di wilayah tersebut sehingga siarannya dapat tersebar secara luas di daerah tersebut. Menteri komunikasi dan informatika telah menyatakan bahwa pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan telah dan harus dijalankan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (KOMINFO RI) No.32/PER/M.KOMINFO/12/2007 tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi bahwa terdapat kategori pengaturan yang akan dilaksanakan demi meningkatkan kinerja stasiun lokal yang mencakup penentuan wilayah layanan siaran, di mana daerah tersebut digolongkan menjadi dua golongan yaitu daerah ekonomi maju dan kurang maju.

Lembaga penyiaran swasta telah sepakat melakukan perjanjian tertulis yang berisi bahwa: a) Penetapan stasiun induk dan anggota, b) Program siaran yang di relay, c) Persentase durasi relay siaran perhari, d) Persentase durasi siaran lokal perhari, e) Penentuan alokasi waktu (Time slot) siaran lokal (Mirza, 2014).

Berdasarkan perkembangan pertelevisian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil studi kasus Lembaga Penyiaran RCTI, Kompas TV dan TRANS 7 sebagai salah satu lembaga televisi swasta yang mewakili masing – masing instansi lembaga Penyiaran Swasta yang ada di Indonesia, yang mencakup suatu daerah tertentu wajib memproduksi konten lokal daerah tersebut terutama Provinsi Bengkulu.

Sistem siaran berjaringan secara umum merupakan sistem pemasokan siaran secara sentral kepada sejumlah stasiun penyiaran. Pemasokan tersebut diatur dan dikendalikan langsung dari stasiun induk yang kemudian direlai di daerah-daerah sebagai anggotanya (Siregar, 2001:37).

Sistem stasiun jaringan masih dianggap sebagai ‘kamufase’ karena umumnya perusahaan-perusahaan lokal yang dibangun sebagai anggota jaringan di Provinsi hanya merupakan perusahaan bentukan Jakarta, sehingga hampir tidak ada bedanya antara sistem penyiaran nasional dan sistem stasiun jaringan karena pada hakikatnya tidak mampu mewujudkan *diversity of ownership* dan *diversity of content* (Judhariksawan, 2010:28).

Keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) menjadi penting untuk menjamin adanya keadilan informasi yang tidak bias kepentingan “pemilik” suatu

media. Selain tentu untuk mendorong pemerataan ekonomi bagi media penyiaran di daerah.

Nicholas Gamham dalam Wallach (2014:12) media dipandang sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi bentuk-bentuk simbolik yang kian memerlukan mobilisasi sumber daya sosial yang langka, baik material maupun kultural. Dalam masyarakat modern sumber daya tersebut sebagian besar dialokasikan dan digunakan di dalam kendala-kendala yang terbentuk dari cara produksi kapitalis.

Hasil penelitian Lisa, M (2011:29) mengenai implementasi Sistem Stasiun Jaringan dalam Industri Penyiaran Televisi di kota Semarang menemukan bahwa stasiun jaringan menyiarkan programnya melalui berbagai stasiun lokal yang menjadi afiliasinya yang terdapat di berbagai daerah. Melalui stasiun induk, pemasangan iklan dapat menyiarkan pesan iklannya kehampir seluruh wilayah negara secara serentak. Salah satu keuntungan memasang iklan pada sistem penyiaran berjaringan adalah kemudahan dalam proses pembelian waktu siaran iklan sebagaimana stasiun penyiaran nasional.

Allyn dalam Djumena (2010) mengatakan bahwa konten merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah media sehingga tantangan bagi media saat ini adalah menyediakan konten yang berkualitas, konten yang bagus akan mendatangkan revenue. Menurutnya permintaan akan konten yang bagus makin meningkat karena masyarakat akan mendapat banyak sekali konten dari berbagai media.

Teori utama yang menjadi tolak ukur pada penelitian ini mengacu pada teori ekonomi politik media Dennis McQuail menyebutkan teori ekonomi politik media sebagai pendekatan yang memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi dari pada muatan (isi) ideologis media. Teori ini mengemukakan ketergantungan ideology pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan penelitian pada analisis empiris terhadap struktur kepemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media.

Teori concentration media menurut Bems dan koleganya (2007) menjelaskan bahwa di mana media memiliki empat dimensi media dan terbagi atas: Konsentrasi Kepemilikan, konsentrasi editor/pemrograman, variasi, kuantitas dan kualitas konten media, dan audiens atau preferensi penonton.

Safardi (2017) mengatakan bahwa program adalah suatu hasil dari menulis kode-kode perintah di mana didalamnya terdapat instruksi-instruksi dari Bahasa pemrograman yang dibuat oleh programmer dalam bentuk produk, aplikasi atau software untuk mempermudah pekerjaan para penggunanya.

Aspek muatan isi dalam program siaran perlu diapresiasi bahwa saat ini telah banyak bermunculan keragaman program dengan berbagai jenis kontennya. Di berbagai kota telah banyak bermunculan televisi lokal dan radio lokal yang menghadirkan program-program yang variatif dan kreatif sehingga dapat menarik perhatian khalayak luas sebagai penikmat televisi.

Program acara yang telah disusun dapat berdiri sendiri dan tidak terkait satu sama lain sepanjang minggu dan bulan, namun terkadang dalam suatu program acara terdapat juga acara yang bersambung yang disebut sebagai television series. Bentuk program semacam ini terdiri dari beberapa paket yang disebut sebagai episode atau miniseries, di mana paket ini disiarkan secara mingguan pada hari yang sama dan slot waktu yang sama, atau setiap hari pada jam yang sama.

Suatu program siaran baik televisi maupun radio yang menggunakan kanal frekuensi daerah wajib mematuhi sistem stasiun jaringan. Hal ini menjadi ketentuan umum bagi setiap lembaga penyiaran swasta. Dengan adanya aturan tersebut dapat meningkatkan sumber daya manusia tidak hanya mencakup wilayah perkotaan melainkan dapat menyebar luas ke pelosok daerah.

Proses migrasi ini menjanjikan keuntungan tidak hanya bagi penyelenggara industri siaran tetapi juga bagi masyarakat luas sebagai pengguna atau penikmat siaran TV.

Pada siaran digital, satu frekuensi dimungkinkan digunakan untuk 6-8 kanal transmisi dengan program siaran yang berbeda melalui penerapan sistem multipleksing. Dengan demikian penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi lebih efisien sehingga dapat mencakup lebih banyak permintaan izin penggunaan frekuensi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO RI) Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk atau Masterplan Frekuensi Radio untuk keperluan penyelenggaraan radio siaran Amplitudo Modulation (AM) Pada Medium Frekuensi (MF) Pita Frekuensi Radio 535 kHz-1605,5 kHz menyatakan wilayah Bengkulu pada urutan XXXVII. Dengan area Wilayah Bengkulu yang meliputi : Kab. Muko-muko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, Bengkulu Kota, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Kaur, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Tengah

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan paradigma post positivisme, Informasi yang diperoleh harus dapat komprehensif, sehingga untuk mencapai hal tersebut peneliti akan melakukan penggalian informasi tidak hanya dari partisipan sebagai objek penelitian dan informan utama dalam penelitian ini tetapi juga orang – orang dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya juga berdasarkan catatan – catatan data mengenai pelaksanaan sistem stasiun berjaringan yang telah dilakukan oleh lembaga penyiaran RCTI, KOMPAS TV dan TRANS 7.

Subjek pada penelitian ini adalah Lembaga penyiaran RCTI, KOMPAS TV, dan TRANS 7 yang merupakan lembaga penyiaran swasta yang bersiaran di wilayah Kota Bengkulu. Sedangkan Objek pada penelitian ini adalah Implementasi sistem stasiun jaringan program konten lokal pada lembaga penyiaran swasta di kota Bengkulu dalam hal ini adalah lembaga penyiaran RCTI, KOMPAS TV, dan TRANS 7.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui, yaitu : Observasi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat secara langsung kondisi di lapangan mengenai penerapan atau implementasi sistem stasiun jaringan yang dilakukan lembaga penyiaran RCTI, KOMPAS TV, dan TRANS 7 di wilayah kota Bengkulu. didukung dengan dokumentasi dan foto untuk memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian.

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : Pengumpulan data dilakukan melalui cara observasi dan wawancara. kepada masyarakat yang berada pada jangkauan siaran dari lembaga penyiaran RCTI, KOMPAS TV dan TRANS 7 di kota Bengkulu, sehingga memperoleh data yang lebih konkret dan mendalam yang kemudian akan direduksi dan dengan teknik triangulasi sumber akan diperoleh data hasil pengamatan dengan observasi dan wawancara kepada masyarakat yang berada pada jangkauan siaran Lembaga penyiaran RCTI, KOMPAS TV dan TRANS 7 di wilayah kota Bengkulu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang diteliti dan diwawancarai merupakan Kepala Divisi/Biro yang ada di Wilayah Bengkulu dan untuk mendapatkan jawaban yang akurat, dikarenakan ketua koordinator dari masing-masing LPS RCTI, TRANS 7 dan KOMPAS TV masih dikendalikan oleh pihak LPS Pusat yang bertanggung jawab Kepada LPS Daerah yang bersangkutan, maka peneliti mengundang pihak LPS Pusat untuk hadir ke Bengkulu.

### **Durasi**

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI, KOMPAS TV, dan TRANS 7 memiliki manajemen waktu yang berbeda maka ditemukan bahwa RCTI melakukan siaran nasional selama 24 jam maka pemenuhan waktu siaran program lokal 10 % dari waktu bersiaran adalah 2 jam 40 menit per hari, KOMPAS TV melakukan siaran nasional selama 24 jam maka pemenuhan waktu siaran program lokal 10 % dari waktu bersiaran adalah 2 jam 40 menit per hari, sedangkan pada TRANS 7 melakukan siaran nasional selama 22 jam maka pemenuhan waktu siaran program lokal 10 % dari waktu bersiaran nasional adalah 2 jam 20 menit.

Waktu siaran program konten lokal belum sepenuhnya dapat diletakkan pada bagian waktu siaran prime time, dari hasil wawancara dengan Ibu Ira Yunita yang merupakan kepala program stasiun RCTI pusat mengatakan bahwa belum adanya advertiser yang memberikan iklannya pada program acara konten lokal dibandingkan program acara lain yang bersiaran secara nasional.

Relay program yang dilakukan oleh masing-masing Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI, KOMPAS TV dan TRANS 7 merupakan upaya mempertahankan kualitas program yang telah ditetapkan oleh manajemen pusat.

### **Jangkauan Wilayah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang berada pada area kota Bengkulu dengan variasi usia terbagi atas rentang usia 17-20 tahun, 20-25 tahun, 25-30 tahun dan rentang usia 50- 60 tahun, peneliti menemukan bahwa masyarakat yang berada pada wilayah kota Bengkulu yaitu pada daerah Pekik nyaring, Padang harapan, Skip, Sawah lebar, Padang kemiling, Sungai serut, Dusun tanjung sakti, Selebar, Sukamerindu, Pasar kambing dapat menikmati siaran dari chanel stasiun televisi secara gratis dengan menggunakan televisi berbasis analog atau free to air.

Masyarakat yang di temui peneliti yang berasal dari daerah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong belum dapat merasakan siaran televisi secara free to air melainkan melalui TV Kabel ataupun saluran televisi berbayar lainnya.

### **Kualitas konten**

Sumber daya manusia lokal yang ada di daerah Bengkulu masih belum mampu mencapai standar yang telah ditetapkan tersebut. Sumber daya manusia yang rendah tersebut menyebabkan Production House (PH) lokal yang tidak memadai. Hasil program yang diciptakan dengan ide yang berjangka pendek mempersulit Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI, KOMPAS TV dan TRANS 7 untuk mengembangkan anggota Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) di daerah Bengkulu.

Pemenuhan program konten lokal dilakukan tidak hanya berdasarkan production house (PH) di daerah saja melainkan juga dapat diproduksi sendiri oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI, KOMPAS TV dan TRANS 7, akan tetapi dengan tidak adanya advertiser yang tertarik menyebabkan lembaga stasiun televisi melakukan program relay dengan program cross culture sehingga dapat memenuhi program konten lokal dengan bermuatan budaya dari seluruh daerah di Indonesia.

### **Variasi Konten**

Program konten lokal Bengkulu yang ditayangkan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI yaitu kategori reality show dan talk show. Reality show dengan judul program Urban, Dua sisi, Kisi-kisi, sedangkan talk show dengan judul program assalamu'alaikum Ustadz. Berdasarkan jenis program yang peneliti peroleh program tersebut merupakan program konten cross culture dimana masing-masing program yang ditayangkan di produksi sendiri oleh manajemen pusat dan ditayangkan secara relay kepada anggota sistem stasiun berjaringan.

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) KOMPAS TV yang merupakan lembaga stasiun televisi berita maka variasi program acara yang ditayangkan merupakan kategori news dengan variasi acara yang beragam seperti dialog, live report dan sebagainya. Jenis televisi berita seperti halnya

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TRANS 7, peneliti menemukan bahwa stasiun televisi keluarga dapat memilih variasi konten program yang dapat disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. TRANS 7 menyesuaikan program konten lokalnya sesuai dengan visi misi dan genre dari stasiun televisi TRANS 7 yaitu family, sehingga program acara konten lokal yang diproduksi berkategori Feature dengan judul Warna Bengkulu, dan Ragam Indonesia.

Program acara konten lokal yang ditampilkan disesuaikan dengan budaya dan dialeg bahasa dari masing-masing daerah dimana Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TRANS 7 berdiri di daerah sebagai anggota Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Budaya maupun sumber daya alam yang ditampilkan murni berlokasi di daerah Bengkulu dengan beragam sumber daya alam yang disajikan dengan baik mampu menarik perhatian masyarakat kota Bengkulu. Akan tetapi dalam melakukan produksi program acara manajemen pusat bermaksud untuk memperoleh income yang cukup, namun tidak tersedianya advertiser yang mau mengisi slot iklan program konten lokal dapat menghambat kinerja dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) itu sendiri.

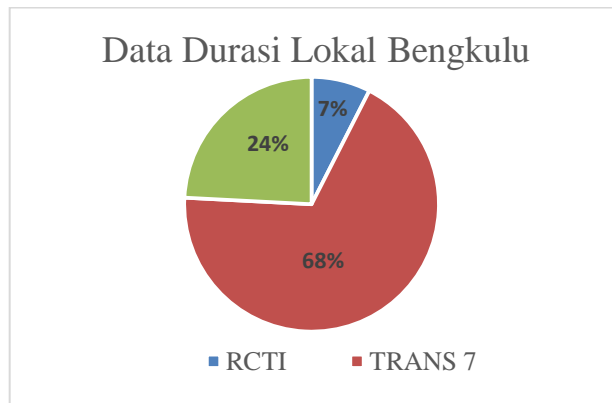
## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara kepada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) di RCTI, KOMPAS TV, dan TRANS 7 diantaranya :

### Durasi

Hasil wawancara dengan ketiga Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) menemukan bahwa dalam proses produksi hingga tayangan program konten lokal bersiaran di wilayah Kota Bengkulu, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI, KOMPAS TV dan TRANS 7 melakukan proses relay dan tidak sepenuhnya program tayangan tersebut program produksi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) daerah atau lokal.

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI, KOMPAS TV dan TRANS 7 masing – masing memberikan jadwal penayangan konten lokal yaitu RCTI pada waktu 03:30 - 05:30 artinya 2 jam dari 24 jam bersiaran, KOMPAS TV pada waktu 04:30 - 07:00 artinya 2,5 jam dari 24 jam bersiaran, dan TRANS 7 pada waktu 03:15 - 04:15 dan 07:00-07:30 artinya 1,5 jam dari 22 jam bersiaran.



Gambar 1. Jumlah durasi konten lokal khusus daerah Bengkulu

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI merupakan lembaga yang belum sepenuhnya menyiarkan program konten lokal khusus daerah Bengkulu, sedangkan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TRANS 7 merupakan lembaga yang paling banyak memproduksi program konten lokal khusus daerah Bengkulu, sedangkan jenis program yang ditayangkan masing-masing Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI,

Berdasarkan teori ekonomi politik media maka dapat diketahui bahwa lembaga penyiaran lebih mengutamakan ekonomi dari pada konten media atau muatan isi dari program yang mereka produksi. Hal ini tentu saja tidak hanya mempengaruhi produksi program, durasi konten lokal yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik terlihat hanya sekedar mampu memenuhi durasi.

## **Jangkauan wilayah**

Wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan daerah dengan tekstur tanah perbukitan menjadi tantangan tersendiri bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) untuk menjangkau seluruh masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

Stasiun penyiaran dalam menjangkau seluruh cover area di wilayah Provinsi Bengkulu membutuhkan transmitter untuk mentransfer sinyal frekuensi program siarannya ke masyarakat. Masyarakat yang berada pada wilayah perbukitan menyulitkan transmitter untuk mencapai area tersebut sehingga Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tidak dapat hanya mengandalkan satu transmitter saja, hal ini tentu berdampak pada biaya yang tidak sedikit bagi masing-masing Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu.

Dengan persebaran masyarakat yang tergolong tidak padat maka Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) kesulitan untuk menyebarkan transmitter mereka. Pendapatan yang akan diperoleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang sedikit dan tidak adanya perhatian pemerintah terhadap kondisi tersebut menjadi faktor utama tidak diterapkannya penyebaran transmitter.

Berdasarkan teori ekonomi politik media, media tergantung pada kekuatan ekonomi mereka, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI, KOMPAS TV dan TRANS 7 di daerah lebih memilih posisi yang strategis dan menguntungkan bagi mereka. Idealnya masyarakat mendapatkan hak untuk memperoleh informasi lebih akurat dan informative dan pemerintah harus dapat menjamin masyarakat mendapat informasi secara layak dan akurat.

## **Kualitas Program**

Program siaran konten lokal Bengkulu yang diproduksi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tidak terlepas dari sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia di daerah. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI, KOMPAS TV, dan TRANS 7 memproduksi program siaran melakukan sistem kerja sama.

Kriteria Production House (PH) ditetapkan langsung oleh manajemen pusat dari masing-masing Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI, KOMPAS TV, dan TRANS 7. Dengan demikian menjadi tantangan Production House (PH) daerah dalam memenuhi standar kualitas program siaran yang mereka produksi. Keterbatasan Production House (PH) untuk memenuhi standar tersebut menyebabkan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tidak mampu mengambil dan mengembangkan program konten lokal yang tersedia, dan dengan biaya yang terbatas maka Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) membatasi kualitas program siaran konten lokal yang diberikan.

Berdasarkan teknis dan regulasi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI, KOMPAS TV dan TRANS 7 telah memenuhi kriteria program siaran konten lokal dengan melakukan relay siaran,.

Berdasarkan teori ekonomi politik media sebagai pendekatan yang memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi dari pada muatan (isi) ideologis media. Maka Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) membuat

muatan isi program konten lokal secara mandiri dan dengan efisiensi keuangan sebaik mungkin dengan merelay kontel daerah lain dan mengulang-ulang kembali tayangan yang sama.

### **Variasi Konten**

Program Konten lokal yang diproduksi secara acak dan dengan tayangan yang berulang-ulang memberikan keuntungan bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI, KOMPAS TV, dan TRANS 7. Variasi program hanya diatasi dengan merelay program yang di produksi dari berbagai daerah jaringan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Upaya relay program televisi nasional memberikan program yang lebih murah dari pada memproduksi program konten lokal sendiri di daerah. Sumber daya manusia yang masih rendah pada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang berada di daerah tersebut menyebabkan terganggunya sistem standar program siaran yang ditetapkan oleh manajemen Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Pusat, sumber daya manusia lokal yang belum mampu sepenuhnya menangani masalah pemograman dengan standar program nasional mengharuskan manajemen pusat mengambil alih proses produksi dan pengeditan program secara nasional.

Produksi acara program konten lokal Bengkulu yang dilakukan secara relay tersebut juga berdampak negatif terhadap daerah, karena dengan pembatasan program yang diproduksi maka potensi wilayah tidak dapat tergali secara efektif dan efisien, sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah Provinsi Bengkulu khususnya akan berkembang secara lambat, ide untuk memproduksi konten lokal Bengkulu yang tidak continue dan hanya memenuhi standar Production House daerah yang mampu untuk memproduksi program menyebabkan Production House (PH) juga berjalan lambat dan tidak dapat dioptimalkan dengan baik.

Selain itu tidak adanya advertiser yang mau mendukung program acara konten lokal Bengkulu yang di produksi oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI, KOMPAS TV dan TRANS 7 dan dapat menurunkan standar program yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga manajemen Stasiun televisi akan memilah data dengan kualitas yang baik dan mengharuskan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) di daerah mengikuti aturan untuk memperoleh income yang sesuai.

Berdasarkan teori ekonomi politik media, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) akan mewujudkan keinginan mereka di pasar media dengan cara apapun, jika program dengan konten tertentu disukai oleh masyarakat maka mereka akan mempertahankan hal tersebut dan menyisihkan program lain agar tidak mengganggu income yang akan di peroleh. Hal tersebut berdampak pada slot waktu yang diberikan oleh pihak Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) RCTI, KOMPAS TV, dan TRANS 7 untuk menjalankan program konten lokal Bengkulu pada waktu dini hari .

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program konten lokal yang dijalankan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) seperti RCTI, KOMPAS TV, dan TRANS 7 di Bengkulu belum sepenuhnya memenuhi kriteria ideal sesuai regulasi. Implementasi konten lokal lebih bersifat formalitas akibat keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan minimnya ketertarikan advertiser. Meskipun masyarakat Bengkulu telah melek media dan menginginkan tayangan berkualitas yang relevan dengan kearifan lokal, program yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan mendalam dalam kebijakan dan eksekusi program konten lokal agar lebih berdampak positif bagi masyarakat.

### Saran

Untuk meningkatkan kualitas program konten lokal, LPS perlu lebih proaktif menggali potensi daerah dengan memanfaatkan kalender event pemerintah Bengkulu serta menayangkannya pada jam prime time. Di sisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah harus memperkuat regulasi dengan sanksi tegas bagi LPS yang tidak mematuhi ketentuan konten lokal sekaligus mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM penyiaran lokal. Dengan demikian, production house (PH) dan masyarakat Bengkulu dapat menghasilkan konten lokal yang mandiri, berkualitas, dan berkelanjutan, sesuai harapan pemirsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, 2017. Media Komunikasi: Sejarah Televisi di Indonesia dan perkembangannya. <https://pakarkomunikasi.com/sejarah-televisi-di-Indonesia> 20 Mei 2017 di akses 08 Februari 2018
- Andreas. 2012. Sistem Basic Data. <http://iknow.apb-group.com/studi-dokumentasi/05-juli-2012> di akses 27 Mei 2017
- Ardana, I. (2005). Desain reflektor antena parabola untuk keperluan komunikasi data teresterial pada frekuensi 2,4 GHz. Bandung. Teknologi Elektro, 4(2), 32-34.
- Armando Ade. 2011. Televisi Jakarta Di Atas Indonesia. Bandung: Bentang
- Armando. 2010. Mengapa Sistem TV Berjaringan harus dijalankan. <https://adearmando.wordpress.com/2010/01/29/mengapa-sistem-tv-berjaringan-harus-dijalankan/> di akses 22 Januari 2018
- Badan Pusat Statistik Bengkulu. 2016. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin dan Kabupaten kota di Provinsi Bengkulu tahun 2011 – 2013 <https://bengkulu.bps.go.id/dynamictable/> 2016/12/14/34 di akses tanggal 19 juli 2018
- Damaledo, Daniel. 2012. <http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/>. Sistem Stasiun Jaringan Di Indonesia Analisis Kebijakan Dan Implementasi Tahun 2005 – 2010. Universitas Gajah Mada di akses 12 Februari 2018
- Della Mia Vita. 2015. <http://www.muvi.com/tv/artikel/survei-kpi-kualitas-program-siaran-tv-menurun-01/12/2015.html> di akses 09 Maret 2018
- Djumena Erlangga. 2010. Konten adalah raja. <http://ekonomi.kompas.com/read/2010/06/03/10313449> di akses 20 Februari 2018
- Feriandi Mirza, 2014. <https://www.slideshare.net/efmirza/implementasi-sistem-stasiun-jaringan-di-Indonesia>. 1/04/2014 di akses 17 April 2018
- Head, Sydney W dan Christopher Sterling. 1982. Broadcasting in America: A Survey of Electronic Media. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Judhariksawan. 2010. Hukum Penyiaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kuntari Angraini. 2012. Pengaturan Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran Televisi Swasta dalam Penggunaan Frekuensi Radio Menurut Pasal 18 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Malang. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.
- Lisa, Mardiana. 2011. Implementasi Kebijakan Sistem Stasiun Jaringan Dalam Industri Penyiaran Televisi Di Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Lumanto. R. 2012. Kebijakan dan tantangan implementasi Penyiaran digital di Indonesia. Workshop Menyongsong Era Penyiaran TV Digital di Indonesia. Manado: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Morrison, 2008. *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, Jakarta: Kencana.
- Morrison. 2009. *Manajemen Media Penyiaran*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Mufid Muhamad. 2005. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta:Prenada Media Group
- Mukharomah Armis. 2014. Tinjauan Hukum Mengenaik Prinsip Diversity Of Ownership dan Diversity Of Content Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Malang. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya
- Nielsen. 2017. [https://databoks.katadata.co.id/tags/media televisi](https://databoks.katadata.co.id/tags/media%20televi%20si), 27 Juli 2017 di akses 06 Mei 2018.
- Noviyanti. 2015. Program Televisi. <http://fenanovianti.blogspot.co.id> di akses 07 April 2018
- Panuju redi. 2015. *Sistem Penyiaran Indonesia: Sebuah Kajian Strukturalisme Fungsional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pendapat hukum dewan pers atas revisi UU Penyiaran dan PP Nomor 20/2005. 2014. *Pers Penyiaran yang independen*. Jakarta. Dewanpers.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
- Peraturan Perundang-undangan Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). 2014. *Himpunan Peraturan perundang-undangan di bidang Penyiaran. Periode 2009-2013.: Permen Kominfo RI: No:49/PER/M.KOMINFO/ 12/2009 tentang rencana dasar teknik penyiaran*.
- Permen Kominfo No.32/PER/M.KOMINFO/12/2007 tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi
- Permen Kominfo Ri Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi
- Primasanti. 2009. Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Scriptura*. Volume 03 Nomor 01 Januari 2009
- Purbo, O. W. (2011). *Jaringan wireless di dunia berkembang: Panduan praktis perencanaan dan pembangunan infrastruktur komunikasi yang rendah biaya*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahardjo. Mudja. 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rahfi Alhafidz Rizal.2017. <https://www.kompasiana.com/>. pentingnya-regulasi-penyiaran. 18 Juli 2017 di akses 20 April 2018
- Redaksi RBTv. 2017. <http://rbtv.co.id/hasil-survei-ac-nielsen-rbtv-paling-sering-ditonton/> 24/10/2017 di akses 21 April 2018
- Riadi Muchlisin. 2016. <http://www.kajianpustaka.com/2016/07/>. Jenis – jenis program televisi, di akses tanggal 15 juni 2018

- Safardi.M. 2017. <http://www.programkita.com/2017/02/>. Pengertian Program Pemrograman, di akses 20 Juni 2018
- Sevilla, G Consuelo dkk. (1993). Pengantar metode Penelitian. Jakarta: UI-PRESS
- Siregar Ashadi. 2001. Menyingkap Media Penyiaran, Membaca Televisi, Melihat Radio. Yogyakarta: LP3Y
- Soeprapto. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Universitas Terbuka
- Subiakto, Henry & Ida, Rachmah. 2014. Komunikasi Politik, Media, & Komunikasi. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syahputra iswandi. 2013. Rezim Media; Pergulatan demokrasi; jurnalisme dan infotainment dalam industri televisi.
- Tamburaka, Apriyadi. 2013, Literasi Media “Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa”. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Wallach Jeremy. 2014. Komunikasi dan Komodifikasi: Mengkaji media dan budaya dalam dinamika Globalisasi. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers
- Wikipedia. 2016. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas\\_TV.7/1/2018](https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_TV.7/1/2018) ensiklopedia bebas di akses 25 juni 2018